

Perempuan & Pandemi Covid-19

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan & Pandemi Covid-19

Artikel

Perspektif Feminisme: Interseksionalitas dan Covid-19

Gadis Arivia

Dari Kehilangan ke ketahanan: Studi atas Pengalaman Perempuan Sumba dalam Penanganan Covid-19

Meylani Yo & Pupu Purwaningsih

Beberapa Pengalaman Perempuan Indonesia dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19

Alimatul Qibtiyah

Mempertahankan Ruang Kewargaan: Perempuan Aktivistis dan Politik Spasial di Masa Pandemi Covid-19

Robertus Robet, Retna Hanani & Charine

Urgensi Perspektif Gender dalam Mitigasi Pandemi Covid-19

Misiyah

Gerakan Perempuan Ulama Merespons Pandemi Covid-19 di Tengah Komunitas: Pengalaman Simpul Rahima

Andi Nur Faizah

Potret Dampak Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Masa Pandemi Covid-19 terhadap

Perempuan dan Kelompok Marginal melalui Pendekatan Feminisme Interseksional

Atnike Nova Sigiyo, Abby Gina & Dewi Komalasari

Diterbitkan oleh:

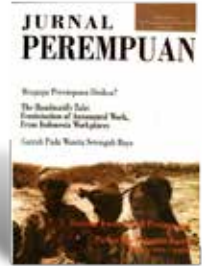


Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke himah@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

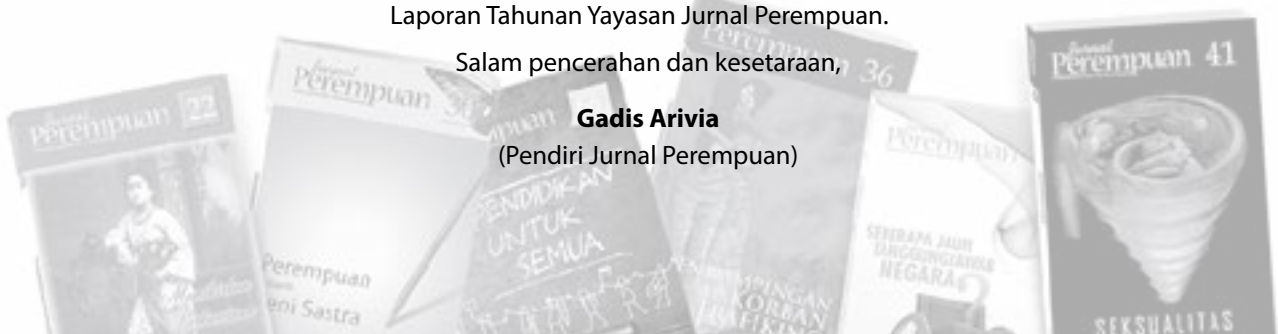
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah
(Hp 081807124295, email: himah@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, Ph.D (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, Ph.D. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, Ph.D. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, Ph.D. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, Ph.D. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)
Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Bagus Takwin (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Ikhaputri Widiyantini, M. Si. (Filsafat dan Feminisme, Universitas Indonesia)
Elisabet Kuswijayanti (Ekologi dan Gender)
Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi
Abby Gina Boangmanalu
Dewi Komalasari
Octania Wynn
Agnes Diana Wahyuni
Hendrik Bolitobi

SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

HOTLINE PELANGGAN :

Andri Wibowo/Gery : 0813 1869 2350 (SMS/WA)

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Tanah Manisan No. 72 RT 07/ RW 03
Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara
Jakarta Timur
Telp: (+62) 812 1098 3075
E-mail : yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com
Twitter : @jurnalperempuan
Facebook : Yayasan Jurnal Perempuan

WEBSITE

www.jurnalperempuan.org
www.indonesiafeministjournal.org

Cetakan Pertama, November 2020

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Pandemi Covid-19/Woman and Covid-19 Pandemic iii-iv
Atnike Nova Sigiro

Artikel

- Perspektif Feminisme: Interseksionalitas dan Covid-19/
Feminist Theoretical Perspective: Intersectionality and Covid-19 221-231
Gadis Arivia
- Dari Kehilangan ke Ketahanan: Studi atas Pengalaman Perempuan Sumba dalam Penanganan COVID-19/
From Loss to Survival: A study on the Sumbanese Women's Experiences during Covid-19 Mitigation 233-246
Meylani Yo & Pupu Purwaningsih
- Beberapa Pengalaman Perempuan Indonesia dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19/
Indonesian Women's Experiences in Dealing with the Impacts of Pandemic Covid-19 247-257
Alimatul Qibtiyah
- Mempertahankan Ruang Kewargaan: Perempuan Aktivist dan Politik Spasial di Masa Pandemi Covid-19/
Maintaining Civic Space: Women Activist and Spatial Politics During Pandemic Covid-19 in Indonesia 259-269
Robertus Robet, Retna Hanani & Charine
- Urgensi Perspektif Gender dalam Mitigasi Pandemi Covid-19/
The Urgency of Gender Perspectives in the Covid-19 Pandemic's Mitigation 271-282
Misiyah
- Gerakan Perempuan Ulama Merespons Pandemi Covid-19 di Tengah Komunitas:
Pengalaman Simpul Rahima/
*Female Ulema's Action Responding to Covid-19 Pandemic in their Communities:
The Experience of 'Simpul Rahima'* 283-294
Andi Nur Faizah
- Potret Dampak Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Masa Pandemi Covid-19 terhadap
Perempuan dan Kelompok Marginal melalui Pendekatan Feminisme Interseksional/
*Portrait of the Impact of the Implementation of Large-Scale Social Distancing during Covid-19 Pandemic
towards Women and Marginalized Groups through the Perspective of Intersectional Feminism*..... 295-308
Atnike Nova Sigiro, Abby Gina & Dewi Komalasari

Perempuan dan Pandemi Covid-19

Woman and Covid-19 Pandemic

Ketimpangan gender di dalam masyarakat dinilai turut memperburuk dampak Pandemi Covid-19 terhadap perempuan. *Rapid Gender Assessment* (RGA) oleh UN Women di Eropa dan Sentral Asia menemukan lebih dari 15 persen perempuan kehilangan pekerjaan, 41 persen perempuan mengalami pengurangan upah, dan menemukan terjadinya peningkatan jam dan beban kerja perempuan di dalam keluarga, selama pandemi Covid-19. Tak hanya dampak ekonomi dan sosial, pandemi Covid-19 juga menyebabkan meningkatnya kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Shadow pandemic* adalah konsep yang menjelaskan fenomena meningkatnya kekerasan terhadap perempuan selama pandemi Covid-19.

Keluarga sebagai *'gendered institution'* merupakan salah satu fokus penting dalam studi-studi feminisme. Feminisme melihat keluarga di dalam masyarakat yang patriarkis sebagai wujud dari relasi gender yang timpang, di mana peran gender perempuan dikonstruksi dan ditempatkan secara subordinat. Dalam struktur masyarakat yang patriarkis, perempuan dilekatkan dengan peran produksi afektif-seksual (*sex-affective production*), yang bertugas memberikan pengasuhan emosional bagi anak dan laki-laki, serta kepuasan seksual bagi laki-laki. Sementara itu, kerja-kerja di dalam keluarga, seperti kerja pengasuhan (*carework*) atau kerja rumah tangga (*housework*), cenderung dianggap memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah, dan dianggap sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan.

Sejak bulan Maret 2020, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan status pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan untuk mencegah meluasnya pandemi adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB merupakan kebijakan pembatasan jarak sosial (*social distancing*) yang mewajibkan pembatasan kegiatan di ruang publik seperti di kantor, pabrik, tempat hiburan, tempat ibadah, restoran, sekolah, pasar, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Pembatasan jarak sosial ini telah mengakibatkan kontraksi terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia. Maka pandemi Covid-19 kemudian dibayangi oleh ancaman PHK terhadap pekerja, serta hilangnya lapangan pekerjaan di berbagai jenis wira usaha dan/ atau sektor informal. Dampak ekonomi dari pandemi tidak hanya terjadi pada ekonomi makro tetapi juga terhadap perekonomian rumah tangga.

Analisis atas relasi gender yang timpang di dalam keluarga penting untuk memahami dampak pandemi Covid-19 terhadap perempuan. Penerapan pembatasan jarak sosial menyebabkan sebagian besar kegiatan di ruang publik harus dilakukan dari rumah. Sehingga di masa pandemi kita melihat munculnya berbagai bentuk kegiatan seperti: bekerja dari rumah (*work from home*), bersekolah jarak jauh, beribadah jarak jauh, termasuk berbelanja daring (*online shopping*). Terpusatnya berbagai kegiatan ke dalam rumah menyebabkan tanggung jawab perempuan di dalam rumah tangga semakin besar. Di masa pandemi, misalnya, seorang ibu yang bekerja (*working mother*) harus dapat mengatur beban dan waktu kerja antara bekerja dari rumah dengan mendampingi anak bersekolah daring. Di masa pandemi, seorang ibu rumah tangga juga harus memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dan biaya listrik yang naik, ketika pendapatan keluarga menurun.

Feminisme interseksional (*intersectional feminism*) merupakan sebuah konsep feminisme yang penting untuk melihat perbedaan situasi yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok marginal di masa pandemi Covid-19. Secara umum beban rumah tangga yang membesar di masa pandemi tentu berdampak terhadap perempuan. Namun perempuan bukanlah entitas yang homogen. Di masa pandemi Covid-19, pekerja rumah tangga (PRT) - yang umumnya dilakukan oleh perempuan, merupakan salah satu profesi yang rentan mengalami eksploitasi. Meski beban kerja PRT di masa pandemi semakin besar, namun pada umumnya PRT tidak mendapatkan tambahan upah. Sebaliknya, selama pandemi PRT justru menjadi rentan terhadap PHK dan stigma sebagai penyebar virus Corona. PRT migran menghadapi kerentanan yang relatif sama dengan PRT di dalam negeri, selain juga rentan untuk dipulangkan kembali ke dalam negeri.

Feminisme interseksional juga dapat mengungkapkan marginalisasi berlapis yang dialami oleh kelompok marginal, seperti LGBT atau transgender. Karena identitas gendernya, kaum transgender memiliki akses terbatas untuk memperoleh pekerjaan di berbagai bidang. Selama penerapan PSBB, jenis pekerjaan yang banyak digeluti oleh kaum transgender, seperti salon kecantikan, pengamen, restoran, merupakan jenis pekerjaan yang banyak ditutup atau dibatasi. Di beberapa kasus, kaum transgender juga menghadapi hambatan akses terhadap

bantuan sosial karena tidak memiliki kartu penduduk. Sementara itu, akibat identitas gendernya, keluarga yang pada umumnya menjadi tumpuan perlindungan di masa pandemi, justru menjadi tempat yang rentan terjadi kekerasan terhadap kelompok transgender. Relasi sosial, ekonomi, dan politik yang timpang, membawa dampak pandemi yang lebih buruk terhadap kelompok yang mengalami ketimpangan berlapis. Kerentanan berlapis inilah yang dialami misalnya oleh kelompok transgender, perempuan dengan disabilitas, pekerja rumah tangga (PRT), perempuan nelayan, pekerja migran, dan lainnya, di masa pandemi Covid-19.

Meski berada dalam posisi subordinat, perempuan tetap memiliki agensi untuk bertahan di masa pandemi, bahkan untuk memberikan dukungan bagi komunitasnya. Perempuan Sumba, misalnya, mengembangkan inisiatif edukasi, pemberian informasi, dan komunikasi mengenai Covid-19, bagi komunitasnya. Agensi perempuan lainnya juga dapat dilihat dari kerelawanan yang dilakukan oleh Solidaritas Pangan Jogja (SPJ). SPJ berhasil mentransformasi pandangan yang bias terhadap kerja perawatan, seperti memasak di dapur, menjadi gerakan solidaritas dapur umum bagi komunitas marginal di masa pandemi Covid-19.

Dalam ruang sosial yang terbatas di masa pandemi Covid-19, perempuan mampu mendorong aksi kolektif, tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga menciptakan ruang bagi kepentingan publik. Pengalaman organisasi perempuan seperti Rahima dan 'Aisyiyah, memperlihatkan gerak kolektif perempuan untuk mendampingi komunitas melalui gerakan solidaritas bantuan dan pendidikan. Sementara itu, KAPAL Perempuan berusaha mengembangkan inisiatif solidaritas sambil tetap memerhatikan kekerasan berbasis gender yang tetap terjadi di masa pandemi,

seperti perkawinan anak. Selain mengatasi tekanan '*gendered space*' yang diakibatkan oleh pandemi, kaum perempuan juga mempertahankan politik kewargaan di ruang publik. Maka, meskipun ruang publik di masa pandemi Covid-19 semakin menyempit, namun para aktivis perempuan tetap turut mengawal politik kewargaan, seperti mendorong pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, mendorong pembahasan RUU Pekerja Rumah Tangga, serta terlibat dalam gerakan untuk mengkritik terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Jurnal Perempuan edisi ke-107 tentang Perempuan dan Pandemi Covid-19 kembali mengkonfirmasi temuan dan pengalaman perempuan di berbagai negara, bahwa di Indonesia pandemi Covid-19 juga membawa beban dan kerentanan lebih terhadap perempuan. Kelindan ketimpangan antara identitas gender, posisi kelas, status sosial, dan pandemi Covid-19, telah menyebabkan kerentanan berlapis terhadap perempuan dan kelompok marginal. Oleh sebab itu, penempatan perempuan secara substantif dalam penanganan pandemi Covid-19 diperlukan tidak hanya karena perempuan merupakan salah satu kelompok yang menghadapi kerentanan besar, tetapi juga karena perempuan merupakan tulang punggung dari proses pencegahan dan pemulihan pandemi. Pengalaman agensi kaum perempuan mengajarkan bahwa pandemi Covid-19 tidak dapat diatasi dengan mendomestikasi persoalan-persoalan yang muncul. Di sini kita kembali diingatkan pada satu argumen yang berkembang di masa feminisme gelombang kedua, bahwa pengalaman-pengalaman personal perempuan tidak dapat dilepaskan dari struktur politik yang bekerja di dalam masyarakat. Bahwa "*the personal is political*". Selamat membaca! **(Atnike Nova Sigiro)**

Gadis Arivia

(Sociology, Anthropology and Criminal Justice Department,
Montgomery College, Takoma Park Campus, MD, USA 20912)

Perspektif Feminisme: Interseksionalitas dan Covid-19

Feminist Theoretical Perspective: Intersectionality and Covid-19

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020, 2 hal. 221-231, 2 gambar, 16 daftar pustaka

The author argues for using a new theoretical foundation and criticizes Gender Mainstreaming perspective in issues related to gender. The author proposes an intersectionality approach that can critically see the problem of Covid-19 and its implications to not only gender relations (men and women) but also race, ethnicity, class, LGBTQIA, and other minority groups. The author emphasizes the concept of critical praxis, which uses both critical questions and activism for total social change.

Keywords: Covid-19, Intersectionality, Critical Praxis, Gender Mainstreaming, Male Crisis

Penulis berargumentasi untuk menggunakan landasan teori baru karena kegagalan perspektif Pengarusutamaan Gender dalam melihat persoalan terkait gender. Penulis mengajukan pendekatan interseksionalitas sebagai pendekatan yang mampu melihat persoalan COVID-19 dan implikasinya yang bukan hanya pada gender (laki-laki dan perempuan) tetapi juga pada ras, etnisitas, kelas, LGBTQIA dan kelompok-kelompok minoritas lainnya. Penulis menekankan konsep *critical praxis*, yaitu bukan saja menggunakan pertanyaan-pertanyaan kritis tetapi juga berpijak pada aktivisme untuk perubahan sosial secara total.

Kata kunci: Covid-19, Interseksionalitas, Praksis Kritis, Pengarusutamaan Gender, Maskulinitas

¹Meylani Yo, ²Pupu Purwaningsih

(¹Universitas Multimedia Nusantara & ²Independent Researcher
Jl. Scientia Boulevard, Gading, Kec. Serpong, Tangerang,
Banten 15227)

Dari Kehilangan Ke Ketahanan: Studi atas Pengalaman Perempuan Sumba dalam Penanganan COVID-19

From Loss to Survival: A study on the Sumbanese Women's Experiences during Covid-19 Mitigation

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020, hal. 233-246, 37 daftar pustaka

This article describes the capacity of Sumbanese women to survive and adapt to the Covid-19 pandemic. Pandemic response creates problems due to changes in various aspects of life, such as health access patterns, social interaction and relationships, work patterns and employment status, religious practice, and school education system. To overcome the impact of pandemic response, they change their behavior and lifestyle, such as utilizing strategic partners in Covid-19-related education, participating as community volunteers, switching professions, and building social support among fellow community members. This study used a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, online focus group discussions, and online surveys.

Keywords: resilience, social relation, stigmatisation, Sumbanese women, Covid-19.

Artikel ini menggambarkan kemampuan kelompok rentan perempuan Sumba dalam bertahan dan beradaptasi menghadapi pandemi Covid-19. Pengendalian pandemi menimbulkan masalah karena adanya berbagai perubahan seperti yang terjadi pada pola akses pelayanan kesehatan, cara berinteraksi dan berelasi sosial, pola kerja dan status hubungan kerja, penghayatan iman, serta sistem pendidikan sekolah. Untuk mengatasi dampak pengendalian pandemi mereka mengubah perilaku dan pola hidup seperti memanfaatkan mitra strategis dalam sosialisasi covid-19, berpartisipasi sebagai relawan sosialisasi, beralih profesi, dan membangun dukungan sosial antar sesama anggota komunitas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus secara daring, serta survei daring.

Kata kunci: ketahanan, relasi sosial, stigmatisasi, perempuan Sumba, Covid-19.

Alimatul Qibtiyah

(Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta; Komnas Perempuan; Jl. Laksda Adisucipto No. 1
Yogyakarta, Indonesia; Jl. Laturharhari 48B Menteng,
Jakarta Pusat, 10310 Indonesia)

Beberapa Pengalaman Perempuan Indonesia dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19

Indonesian Women's Experiences in Dealing with the Impacts of Pandemic Covid-19

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020, hal. 247-257, 2 tabel, 32 daftar pustaka

The Covid-19 pandemic has brought serious impact due to its massive scale, that occur all over the world, at all levels of groups within society. This disaster has a strong social dimension because its vulnerabilities often intersects with the existing social stratification. In various disasters, women often become one of the most vulnerable to be affected, especially in the context of culture of patriarchy, that intertwine with misogynistic interpretations of religion, and the unfriendly economic and political system towards women. This article aim to identify the forms of the impacts Covid-19 pandemic on women, overnment's regulations that deal with these impacts, as well as women's efforts both as individual and in groups in dealing those impacts. This research was conducted through literature study over various researches by several institutions, also through observation and interviews with several women groups. The results of this study found that women are one of the most vulnerable and the most affected groups of Covid-19 Pandemic. Although rather delayed, government has included women in the decision-making in handling the situation of women, children and vulnerable groups during the pandemic. Women's experiences both as individual and groups in responding to the impact of pandemic also deserve some appreciation. This research found that during the pandemic, women have shown their resilience, creativity, and put forward women's collaboration.

Keywords: women and pandemic, Covid-19 pandemic, women resilience

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang sangat serius karena bersifat masif, terjadi di seluruh dunia, pada semua level di berbagai kelompok di dalam masyarakat. Bencana ini memiliki dimensi sosial yang kuat karena kerentanan yang muncul kerap beririsan dengan stratifikasi sosial yang ada. Dalam berbagai bencana, perempuan merupakan salah satu kelompok yang rentan terdampak, terutama dalam konteks budaya patriarki yang berkelindan dengan penafsiran agama yang misoginis, serta sistem ekonomi dan politik yang tidak

ramah pada perempuan. Tulisan ini berusaha untuk menemukan bentuk-bentuk dampak pandemi Covid-19 terhadap perempuan, peraturan negara yang dibuat untuk mengatasi dampak pandemi tersebut, serta upaya-upaya kaum perempuan baik secara individu ataupun kelompok dalam menghadapi pandemi. Riset ini dilakukan dengan teknik pengumpulan studi dokumen dari berbagai hasil riset beberapa lembaga, serta observasi dan wawancara pada beberapa kelompok perempuan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perempuan merupakan salah satu kelompok yang paling rentan dan paling terdampak oleh Pandemi Covid-19. Walaupun agak terlambat, pemerintah telah melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait penanganan perempuan, anak dan kelompok rentan di masa pandemi. Pengalaman perempuan baik secara individu dan maupun kelompok dalam merespons dampak pandemi juga patut mendapatkan apresiasi. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan memiliki kelentingan dalam menghadapi pandemi, kreatif, serta mengedepankan kolaborasi di antara perempuan.

Kata Kunci: perempuan dan pandemi, pandemi Covid-19, kelentingan perempuan

¹Robertus Robet, ²Retna Hanani, ³Charine
(¹Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, ²Departemen Ilmu Administrasi Publik Universitas Diponegoro, ³Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta; ^{1,3}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur; ²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudharto SH, Tembalang, Semarang)

Mempertahankan Ruang Kewargaan: Perempuan Aktivistis dan Politik Spasial di Masa Pandemi Covid-19

Maintaining Civic Space: Women Activist and Spatial Politics During Pandemic Covid-19 in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020, hal. 259-269, 1 tabel, 27 daftar pustaka

The Covid19 pandemic has changed society's spatial practices substantially. Large-scale social restrictions, lockdowns, and the obligation to wear masks have changed the way humans relates to each other personally and politically. This article discusses how the pandemic has shaped civic space of women activists and how women activists maintain and create citizenship space amid the pandemic and democratic regression. The data source of the article is collected through online survey of 20 female activists and in-depth online interviews. The results show that civil society organizations in Indonesia are under immense pressure due to pandemic and democratic regression. For civil society organizations, their space is limited by various legal regulations and various violence and stigma aimed at civil society activists. More than that, for women activists the pandemic also provides additional domestic burdens which make the space for women activists increasingly limited. In the midst of these obstacles, our research shows that women and civil society activists do not reduce their intensity in maintaining the civic space.

Key words: pandemic, civic space, spatial politics, democracy.

Pandemi telah mengubah praktik spasial masyarakat secara substansial. Pembatasan sosial berskala besar, *lockdown*, dan kewajiban memakai masker telah mengubah cara manusia membangun relasi intim maupun relasi kewargaan dan demokrasi. Artikel ini membahas tentang bagaimana pandemi mengubah ruang kewargaan (*civic space*) perempuan aktivis dan bagaimana mereka mempertahankan dan menciptakan ruang kewargaan ditengah pandemi dan regresi demokrasi. Sumber data artikel adalah survei elektronik 20 perempuan aktivis dan wawancara mendalam melalui medium daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*) di Indonesia mengalami tekanan yang semakin berat.

Bagi organisasi masyarakat sipil, ruang gerak mereka dibatasi oleh berbagai peraturan hukum dan pelbagai kekerasan dan stigma yang ditujukan kepada aktivis *civil society*. Lebih dari itu, bagi perempuan aktivis, pandemi juga memberikan beban tambahan domestik yang membuat ruang gerak perempuan aktivis semakin terbatas. Di tengah hambatan-hambatan tersebut, penelitian kami menunjukkan bahwa perempuan aktivis dan *civil society* tidak mengurangi intensitas mereka dalam mempertahankan ruang kewargaan.

Kata kunci: pandemi, ruang kewargaan, politik spasial, demokrasi

Misiyah
(Institut KAPAL Perempuan Jl. Kalibata Timur Raya, No. 5
Jakarta Selatan 12740, Indonesia)

Urgensi Perspektif Gender dalam Mitigasi Pandemi Covid-19

The Urgency of Gender Perspectives in the Covid-19 Pandemic's Mitigation

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020, hal. 271-282, 18 daftar pustaka

This paper looks at the urgency of gender perspective in Covid-19 pandemic's mitigation in Indonesia. This is crucial given the lack of gender perspective in measures to handle the pandemic in Indonesia and therefore deepening the existing gender inequality. This situation can be seen in the mitigation of the pandemic's impacts, particularly the specific impact of the pandemic on women within the gender cross-sectoral issues (economy, health, and education), and women's participation in the decision-making processes. Data during the pandemic show that the pandemic has caused serious impacts on women. Therefore, data and gender analysis are needed in order to ensure that measures in handling the pandemic would address the problems that are faced by women and vulnerable groups. This paper will present data from global and national, as well as data from KAPAL Perempuan's field experiences in its collaboration with its local partner organizations in 6 (six) provinces. The paper also draws from documentation from the experiences of other organizations in integrating gender perspective from the past natural disasters' mitigations that ever occurred in Yogyakarta, West Sumatra, Palu, and Lombok.

Keywords: gender and pandemic, women's leadership, pandemic and violence against women, grassroots women

Tulisan ini membahas urgensi perspektif gender dalam mitigasi pandemi di Indonesia. Ini penting dilakukan karena perspektif gender dalam penanganan pandemi di Indonesia masih minim dan mengakibatkan ketimpangan gender makin menajam. Hal ini dapat dirasakan pada penanganan dampak pandemi yang spesifik dialami perempuan pada isu-isu gender lintas sektoral (ekonomi, kesehatan, pendidikan), serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Data-data selama pandemi menunjukkan bahwa pandemi mempunyai dampak serius terhadap kehidupan perempuan. Oleh karena itu, data dan analisis gender dibutuhkan agar penanganan pandemi dapat menjawab masalah perempuan dan kelompok rentan lainnya. Tulisan ini akan mengungkap data global, nasional dan pengalaman lapangan dari Institut KAPAL Perempuan bersama organisasi mitra lokal yang selama ini bekerja sama secara intensif di 6 (enam) provinsi. Tulisan ini juga merujuk pada dokumentasi pengalaman beberapa pihak dalam mengintegrasikan perspektif gender untuk mitigasi bencana alam yang pernah terjadi di Yogyakarta, Sumatera Barat, Palu, dan Lombok.

Kata kunci: gender dan pandemi, kepemimpinan perempuan, perkawinan anak perempuan, pandemi dan kekerasan terhadap perempuan, perempuan akar rumput.

Andi Nur Faizah
(Rahima-Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan, JL. H. Shibi No. 70, RT. 007/01, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan)

Gerakan Perempuan Ulama Merespons Pandemi Covid-19 di Tengah Komunitas: Pengalaman Simpul Rahima

Women Ulama's Action Responding to Covid-19 Pandemic in their Communities: The Experience of 'Simpul Rahima'

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020, hal. 283-294, 1 tabel, 1 gambar, 1 gambar, 19 daftar pustaka

This article raises the experience of female ulama's autonomy and strength in responding to the Covid-19 pandemic in their communities. The female ulama that is represented by Simpul Rahima in this article, refers to the female ulemas who have attended series of Female Ulama School, that are based in community, with gender equality perspective about Islam. Data collection is conducted through focused group discussion (FGD) and online observation. This study reveals that self-autonomy of the female ulama has distinct characteristic from those of male ulama. The female ulama's preach is based on women's real experience. Female ulama also utilize their authority politically to disseminate a peaceful, full of compassion and just Islamic teaching amidst religious interpretation which often marginalizes the position of women. In related with strength, female ulama utilize majelis taklim to preach a gender-just Islam as well as organize women's collective strength.

Keywords: female ulama, Covid-19 pandemic, women's autonomy

Tulisan ini mengangkat pengalaman otonomi dan kekuatan perempuan ulama dalam merespons pandemi Covid-19 di komunitas mereka. Perempuan ulama atau yang disebut dengan Simpul Rahima di dalam tulisan ini merujuk pada ulama dengan jenis kelamin perempuan yang telah mengikuti rangkaian Pendidikan Ulama Perempuan, memiliki basis di komunitas, serta memiliki perspektif Islam yang adil gender. Pengambilan data dilakukan melalui *focused group discussion* (FGD) dan pengamatan secara daring (*online*). Penelitian ini menemukan bahwa otonomi diri Simpul Rahima memiliki kekhasan yang berbeda dengan laki-laki ulama. Perempuan ulama mendakwahkan agama berbasis pengalaman riil perempuan. Perempuan ulama juga secara politis memanfaatkan otoritas yang dimiliki untuk menyebarkan ajaran Islam yang damai, penuh kasih sayang, dan berkeadilan bagi perempuan di tengah penafsiran agama yang kerap meminggirkan posisi perempuan. Terkait kekuatan, perempuan ulama menggunakan majelis taklim untuk mengajarkan Islam yang adil gender sekaligus mengorganisasi kekuatan kolektif perempuan.

Kata kunci: perempuan ulama, pandemi Covid-19, otonomi perempuan

¹Atnike Nova Sigi, ²Abby Gina, ³Dewi Komalasari
(^{1,2,3}Jurnal Perempuan & ¹Universitas Paramadina ^{1,2,3}Jl. Tanah Manisan 72, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur; ¹Jl. Gatot Subroto No. Kav 97, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan)

Potret Dampak Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Perempuan dan Kelompok Marginal melalui Pendekatan Feminisme Interseksional

Portrait of the Impact of the Implementation of Large-Scale Social Distancing during Covid-19 Pandemic towards Women and Marginalized Groups through the Perspective of Intersectional Feminism

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020, hal. 295-308, 1 tabel, 37 daftar pustaka

Social distancing has been used as one of the methods to prevent the spreading of Corona virus during the Covid-19 pandemic. This method has been applied in many countries. In Indonesia, the social distancing method is implemented based on the Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), a large-scale social distancing policy. Through PSBB policy, a large number of activities in public domain must be closed and/or be restricted. Meanwhile, many of societal activities, such as schooling and working, must be held through long distance or being conducted at home. The application of social distancing has caused increasing of women's responsibilities on care work and house work in domestic domain. Through intersectional feminism's perspective, this article tries to elaborate the impact of the application of social distancing towards women and marginalized groups. This article found that the existing inequalities namely gender inequality, class inequality, and other forms of social inequality that have been experienced by women and the marginalized groups, have worsened their situations during the application of social distancing policy in Indonesia during the Covid-19 pandemic.

Key words: Covid-19 pandemic, intersectional feminism, social distancing, care work

Pembatasan jarak sosial (*social distancing*) adalah salah satu bentuk metode pencegahan penyebaran virus Corona di masa pandemi Covid-19. Metode ini dijalankan oleh berbagai di negara. Di Indonesia, metode pembatasan jarak sosial ini dijalankan melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan penerapan PSBB maka sejumlah besar kegiatan di ruang publik harus ditutup dan/atau dibatasi. Sementara itu, sebagian besar aktivitas masyarakat, seperti bersekolah dan bekerja, harus dilakukan jarak jauh atau dilakukan di rumah. Penerapan pembatasan jarak sosial tersebut menyebabkan bertambahnya kegiatan rumah tangga, dan hal ini memperbesar tanggung jawab perempuan dalam kerja-kerja perawatan (*carework*) dan kerja rumah tangga (*housework*) di ranah domestik. Melalui perspektif feminisme interseksional, artikel ini mencoba memaparkan dampak penerapan pembatasan jarak sosial di Indonesia terhadap perempuan dan kelompok marginal. Artikel ini menemukan bahwa berbagai ketimpangan seperti ketimpangan gender, ketimpangan kelas, dan ketimpangan sosial yang selama ini dialami oleh perempuan dan kelompok marginal di dalam tulisan ini telah memperburuk situasi mereka di saat penerapan pembatasan jarak sosial dilakukan di Indonesia.

Kata kunci: pandemi Covid-19; feminisme interseksional; pembatasan jarak sosial; kerja perawatan

Urgensi Perspektif Gender dalam Mitigasi Pandemi Covid-19

The Urgency of Gender Perspectives in the Covid-19 Pandemic's Mitigation

Misiyah

Institut KAPAL Perempuan
Jl. Kalibata Timur Raya, No. 5 Jakarta Selatan 12740, Indonesia

misi@kapalperempuan.org

Kronologi Naskah: diterima 14 Oktober 2020, direvisi 28 Oktober 2020, dinyatakan diterima 11 November 2020

Abstract

This paper looks at the urgency of gender perspective in Covid-19 pandemic's mitigation in Indonesia. This is crucial given the lack of gender perspective in measures to handle the pandemic in Indonesia and therefore deepening the existing gender inequality. This situation can be seen in the mitigation of the pandemic's impacts, particularly the specific impact of the pandemic on women within the gender cross-sectoral issues (economy, health, and education), and women's participation in the decision-making processes. Datas during the pandemic show that the pandemic has caused serious impacts on women. Therefore, data and gender analysis are needed in order to ensure that measures in handling the pandemic would address the problems that are faced by women and vulnerable groups. This paper will present data from global and national, as well as data from KAPAL Perempuan's field experiences in its collaboration with its local partner organizations in 6 (six) provinces. The paper also draws from documentation from the experiences of other organizations in integrating gender perspective from the past natural disasters' mitigations that ever occurred in Yogyakarta, West Sumatra, Palu, and Lombok.

Keywords: gender and pandemic, women's leadership, pandemic and violence against women, grassroots women

Abstrak

Tulisan ini membahas urgensi perspektif gender dalam mitigasi pandemi di Indonesia. Ini penting dilakukan karena perspektif gender dalam penanganan pandemi di Indonesia masih minim dan mengakibatkan ketimpangan gender makin menajam. Hal ini dapat dirasakan pada penanganan dampak pandemi yang spesifik dialami perempuan pada isu-isu gender lintas sektoral (ekonomi, kesehatan, pendidikan), serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Data-data selama pandemi menunjukkan bahwa pandemi mempunyai dampak serius terhadap kehidupan perempuan. Oleh karena itu, data dan analisis gender dibutuhkan agar penanganan pandemi dapat menjawab masalah perempuan dan kelompok rentan lainnya. Tulisan ini akan mengungkap data global, nasional dan pengalaman lapangan dari Institut KAPAL Perempuan bersama organisasi mitra lokal yang selama ini bekerja sama secara intensif di 6 (enam) provinsi. Tulisan ini juga merujuk pada dokumentasi pengalaman beberapa pihak dalam mengintegrasikan perspektif gender untuk mitigasi bencana alam yang pernah terjadi di Yogyakarta, Sumatera Barat, Palu, dan Lombok.

Kata kunci: gender dan pandemi, kepemimpinan perempuan, perkawinan anak perempuan, pandemi dan kekerasan terhadap perempuan, perempuan akar rumput.

Pendahuluan

Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (*Public Health Emergency of International Concern*) sejak 30 Januari 2020 dan pada 11 Maret 2020 menetapkan wabah Covid-19 sebagai pandemi global (WHO 2020). Pandemi Covid-19 dalam tulisan ini selanjutnya disebut dengan pandemi. Laporan PBB "*Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the socio-economic impacts of COVID-19*" yang dirilis Maret 2020, menyebutkan bahwa kelompok yang paling rentan terdampak pandemi adalah

perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, para lansia, dan pekerja informal.

Sementara itu, data PBB yang disampaikan saat Sidang Majelis Umum menyambut 25 tahun peringatan Landasan Aksi Beijing (*Beijing Platform for Action*), 1 Oktober 2020 menunjukkan bahwa tahun 2020 adalah tahun kritis untuk memajukan kesetaraan gender (United Nations 2020a). Data tersebut menyebutkan 750 juta anak perempuan dan perempuan yang hidup hari ini telah dinikahkan sebelum ulang tahun ke-18, 400 juta perempuan hidup dalam kemiskinan ekstrem, 243 juta perempuan menjadi korban kekerasan dari pasangan

intimnya setiap tahun, dan 200 juta anak perempuan dan perempuan telah menjalani sunat. Data ini menunjukkan adanya ancaman serius terhadap kehidupan perempuan, terutama di Indonesia yang memiliki 134.657 jiwa penduduk perempuan.

Dalam laporan Indeks Gender SDGs tahun 2019 (Equal Measures 2019), yaitu laporan yang mengkaji kondisi kesetaraan gender di 129 negara, mencakup 95% perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia, untuk menilai 14 dari 17 Tujuan SDGs, terlihat bahwa dari 129 negara yang diteliti, tidak ada satu pun yang memiliki kinerja terbaik di dunia. Skor global rata-rata adalah 65,7 dari 100 yang masuk kategori "buruk" dalam sistem penilaian indeks. Secara keseluruhan laporan itu menunjukkan sebanyak 2,8 milyar perempuan dan anak perempuan tinggal di negara-negara dengan skor kesetaraan gender yang "sangat buruk" (59 ke bawah) atau skor "buruk" (60 - 69). Hanya 8% dari total populasi perempuan dan anak perempuan di dunia yang tinggal di negara-negara dengan skor "baik" (80 - 89).

Data perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan dalam situasi pandemi saat ini perlu mendapat perhatian khusus. Laporan Badan Dana Penduduk PBB/UNFPA (UNFPA 2020) memprediksi bahwa akibat situasi pandemi ini, dalam dua tahun ke depan akan terjadi peningkatan angka perkawinan anak menjadi sekitar 13 juta anak di dunia. Peningkatan kasus perkawinan anak ini akan banyak terjadi di negara-negara dengan tingkat perkawinan anak yang masuk dalam kategori tinggi. Indonesia merupakan negara yang berpotensi menjadi penyumbang terhadap lonjakan ini karena berdasarkan data UNICEF Indonesia (2019), Indonesia menduduki peringkat ke-8 perkawinan anak di dunia, dengan 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun.

Sementara kekerasan terhadap perempuan terjadi disebabkan oleh situasi pandemi terutama hilangnya sumber pendapatan yang memicu terjadinya pertengkaran dan kekerasan suami terhadap istri. Seperti penuturan Yerni Selly Bolu, fasilitator Sekolah Perempuan di Kupang memberikan data lapangan, kasus pemukulan suami terhadap istri seorang penyandang disabilitas yang bekerja sebagai penjual sayur keliling ini disebabkan istri tidak mampu memenuhi kebutuhan makan ketiga anak dan suaminya.

Pemerintah Indonesia telah menginisiasi beberapa program untuk menangani isu gender dalam masa pandemi antara lain Gerakan BERJARAK, protokol layanan untuk korban kekerasan, Layanan Psikologi Sehat Jiwa/

SEJIWA (KPPPA 2020a) dan memberikan bantuan spesifik seperti pembalut, popok, dan kebutuhan khusus lainnya bagi perempuan dan kelompok rentan (KPPPA 2020b). Sayangnya upaya-upaya tersebut dianggap prioritas hanya oleh institusi-institusi yang diberi tanggung jawab langsung menangani isu-isu perempuan. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, perspektif gender masih minim dalam Gugus Tugas yang sekarang diganti dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sesuai dengan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Institusi ini belum menunjukkan komitmennya terhadap isu gender sebagai isu prioritas yang harus menjadi arus utama dalam setiap agendanya.

Dalam soal kebencanaan, Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PERKA BNPB) No.13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana. PERKA ini memastikan bahwa penanggulangan bencana harus mengimplementasikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran. Dalam pasal 4 diatur empat indikator untuk memastikan pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana yaitu akses, partisipasi, kontrol terhadap sumber daya, dan pengambilan keputusan serta manfaat dari kebijakan dan program. Dipastikan ada data pilah dan pemberian perlakuan khusus kepada perempuan kepala rumah tangga, ibu hamil dan menyusui, laki-laki kepala rumah tangga tanpa ibu rumah tangga, dan kelompok rentan lainnya. Sayangnya, dalam masa pandemi ini BNPB sama sekali belum pernah menyinggung peraturan yang telah diterbitkan tersebut.

Artikel ini akan mengangkat realitas isu-isu gender dalam kebencanaan yang sering kali luput dari perhatian pemerintah dan publik. Bahkan isu-isu perempuan yang naik ke permukaan dengan jelas pun kerap dianggap sepele dan tidak strategis. Dampaknya adalah perempuan mengalami situasi yang semakin memburuk secara ekonomi, sosial, budaya dan politik sebagai akibat dari konstruksi gender. Situasi ini membutuhkan pendekatan yang responsif gender agar isu-isu perempuan yang ada dalam kebencanaan dapat diangkat, diakui dan dicarikan jalan keluar. Pengalaman mitigasi kebencanaan di Indonesia, seperti di Yogyakarta, Sumatera Barat, Aceh, Palu, dan Lombok, memperlihatkan bahwa inisiatif yang dilakukan masyarakat terutama gerakan perempuan, kerap muncul. Salah satunya adalah inisiatif *Gender Working Group*, jejaring berbagai organisasi perempuan yang memberi perhatian pada kebencanaan dan isu

gender. Namun karena keterbatasan penulisan, artikel hanya menuliskan inisiatif-inisiatif yang dikembangkan Institut KAPAL Perempuan¹ bersama lima organisasi-organisasi mitra² dan Sekolah Perempuan Nusantara³ di Padang, Lombok Utara, Pangkajene dan Kepulauan, Lombok Timur, Gresik dan Kupang.

Kerangka Analisis untuk Memotret Isu Gender

Pandemi Covid-19 telah menjadi krisis kesehatan yang serius dan dirasakan oleh semua masyarakat dunia, tidak terkecuali Indonesia. Selain soal kesehatan, pandemi juga memunculkan berbagai dampak krusial terutama bagi perempuan. Aturan pembatasan jarak sosial, belajar di rumah, dan bekerja di rumah punya dampak beragam dan bobot yang dipengaruhi oleh identitas seseorang. Semakin marginal identitas seseorang, maka beban yang akan ditanggung semakin berat dan akses terhadap Jaring Pengaman Sosial semakin jauh.

Pemerintah telah memberikan perhatian besar kepada masalah kesehatan dan ekonomi sebagai dampak pandemi karena dirasakan secara masif dan mudah dibuktikan. Meski begitu, Pemerintah juga seharusnya mengindahkan beberapa masalah perempuan yang justru meningkat selama masa pandemi seperti terjadinya kekerasan terutama di ranah domestik, beban kerja yang semakin banyak, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, penelantaran, dan perkawinan anak.

Untuk membantu menemukan isu gender dalam pandemi, penulis merujuk pada kerangka teoretis yang dijelaskan oleh Mansour Faqih dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (1995). Menurut Faqih, terdapat lima bentuk ketidakadilan yang disebabkan oleh konsep gender yang berlaku dalam masyarakat patriarki. Mereka adalah *double burden* (beban ganda), *stereotype* (pelabelan negatif), *violence* (kekerasan), *marginalisasi* (pemiskinan ekonomi), dan *subordination* (subordinasi).

Beban ganda (*double burden*) muncul karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga. Pandangan ini berakibat semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Misalnya di kalangan keluarga miskin beban sangat berat bisa jadi harus ditanggung oleh perempuan sendiri, terlebih jika si perempuan juga bekerja mencari nafkah, maka ia memikul beban kerja ganda.

Kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, terjadi karena perbedaan identitas gender. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan secara

halus seperti pelecehan. Banyak sekali kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang diakibatkan adanya stereotip gender.

Tidak setiap marginalisasi disebabkan oleh ketidakadilan gender. *Marginalisasi* (pemiskinan) yang dipersoalkan dalam analisis gender adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender. Misalnya, banyak perempuan desa tersingkirkan dan menjadi miskin akibat pertanian hanya difokuskan kepada kaum laki-laki.

Subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya kepada kaum perempuan, terjadi di dalam keluarga dan masyarakat. Akibatnya banyak kebijakan dibuat tanpa menganggap penting kaum perempuan. Hal ini dapat dilihat misalnya pada anggapan bahwa perempuan hanya pantas di dapur sebatas *konco wingking* (istilah dalam bahasa Jawa yang berarti pendamping).

Stereotype (pelabelan negatif) terhadap jenis kelamin tertentu menyebabkan terjadinya diskriminasi serta berbagai bentuk ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat banyak sekali pelabelan negatif yang diletakkan pada kaum perempuan yang membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. Misalnya keyakinan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama, sementara perempuan bekerja itu dinilai sebagai tambahan sehingga dibayar lebih rendah.

Isu Gender dalam Pandemi Covid-19

Artikel ini mengurai beberapa contoh dampak pandemi terhadap perempuan terutama perempuan kelas bawah. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana menguatnya masalah beban ganda, kekerasan, marginalisasi, subordinasi, dan stereotip terhadap perempuan terjadi saat pandemi.

Beban ganda

Sebelum pandemi, dalam kesehariannya, perempuan (terutama kelompok miskin) telah menghadapi masalah beban ganda dan jam kerja yang panjang. Data yang dihasilkan dalam pengumpulan data partisipatif menggunakan kerangka analisis gender Harvard untuk menghitung aktivitas harian perempuan dan laki-laki dalam keluarga yang diselenggarakan KAPAL Perempuan sejak tahun 2013 di desa-desa wilayah percontohan Sekolah Perempuan, ditemukan bahwa perempuan mengalami jam kerja panjang setiap hari berkisar antara 12-14 jam. Di masa pandemi, perempuan punya beban tambahan karena menjadi tumpuan

penyediaan pangan keluarga. Ketersediaan makanan untuk keluarga digantungkan pada perempuan. Aktivitas dapur umum atau pembagian nasi bungkus misalnya, cenderung dipadati oleh perempuan. Fakta di lapangan ini terkonfirmasi dalam Data UN Women (2020) tentang Menilai Dampak Covid-19 Terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menyebutkan bahwa pandemi menyebabkan meningkatnya pekerjaan rumah tangga, kerja perawatan, dan pengasuhan tak berbayar dengan intensitas peningkatan perempuan sebesar 19%, sementara laki-laki 11%.

Kisah SK (40 tahun)⁴, seorang ibu rumah tangga dari bantaran kali Ciliwung dapat menjadi gambaran beban ganda ini. Masa pandemi membuat SK dan suaminya kehilangan pekerjaan sebagai penjual buah potong di pasar. Sesekali SK mendapatkan uang karena diminta membantu tetangga untuk membuang sampah atau belanja ke pasar dan diberi upah Rp 5000, -. SK menikah usia 14 tahun, sehingga di usia 40 tahun ia sudah memiliki 7 anak; 2 anak sudah mandiri dan 5 anak masih menjadi tanggungannya. Ia harus memastikan anak-anak yang rentang usianya 14 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dan 2, 5 tahun tidak kelaparan.

Saat ada pembagian nasi bungkus, SK harus berjalan kaki menuju lokasi dengan membawa dua anak balita di kerumunan untuk mengantre sejak jam 10 pagi hingga jam 1 siang. Dari pembagian tersebut ia hanya mendapatkan 1 bungkus nasi. Sesampai rumah, 1 bungkus nasi tersebut harus ia bagikan untuk 4 orang anaknya yang masih kecil.

Kisah SK menggambarkan beban ganda perempuan pada masa normal maupun terus terjadi di masa darurat seperti pandemi Covid-19. Justru pada masa darurat ini beban penyediaan pangan keluarga semakin sulit. Akses terhadap makanan ada di dapur umum, di tempat-tempat pemberian bantuan, dengan risiko tidak patuh terhadap protokol kesehatan di masa pandemi. Ketika mengantre bantuan di dapur umum, SK harus menghadapi situasi pelanggaran kepatuhan pada protokol kesehatan, seperti pelanggaran jarak dan penggunaan masker. Sehingga beban ganda di masa pandemi bukan semata-mata beban kerja ganda namun juga risiko yang berlipat-lipat.

Situasi ini sama dengan hasil *Kajian Dinamika Perubahan Di Dalam Rumah Tangga Selama Covid-19 Di 34 Provinsi Di Indonesia* oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan selama April – Mei 2020 (Komnas Perempuan 2020a). Pada bagian perubahan beban kerja rumah tangga dan pengasuhan yang terjadi selama masa pandemi, mayoritas responden mengaku

mengurus rumah tangga (perempuan 89%; laki-laki 83,4%), sementara 96% responden merasakan beban pekerjaan rumah tangga semakin banyak. Perempuan bekerja dua kali lipat mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan durasi lebih dari 3 jam. Terdapat 1 dari 3 responden yang melapor bertambahnya pekerjaan rumah tangga membuat dirinya mengalami stres.

Kekerasan

Siaran pers Komnas Perempuan pada 14 Agustus 2020 yang memuat laporan kajian berjudul *"Melayani dengan Berani: Gerak Juang Pengada Layanan dan Perempuan Pembela HAM di Masa COVID-19"* melaporkan terjadinya 1.299 kasus kekerasan terhadap perempuan (termasuk anak perempuan) sepanjang Maret hingga Mei 2020 (Komnas Perempuan 2020b). Kekerasan terhadap perempuan di ranah privat masih di posisi tertinggi yaitu 784 kasus (66%). Kekerasan psikis dan fisik masih mendominasi di ranah privat, sedangkan kekerasan seksual masih tinggi di ranah publik dan negara. Selain itu kekerasan terhadap perempuan secara daring ada sebanyak 129 kasus (11%), yang didominasi oleh ancaman bernuansa kekerasan seksual.

Kekerasan terhadap perempuan juga terjadi dalam bentuk perkawinan anak, karena selain melanggar hak anak, juga berpotensi menimbulkan dampak fisik, seksual, dan mental pada anak yang dipaksa kawin. Selama pandemi Covid-19 telah terjadi peningkatan jumlah perkawinan anak. Berdasarkan penuturan dari tim fasilitator dari organisasi Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM), mitra KAPAL Perempuan di Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa anak-anak mengeluhkan rasa jenuhnya belajar jarak jauh, tidak ada kepastian kapan masuk sekolah dan tidak mempunyai teman bermain. Maka pilihan menikah dianggap sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalahnya.

Keinginan untuk menikah tidak hanya muncul dari anak-anak, tetapi juga akibat kecemasan yang dialami para orang tua yang ingin menyelamatkan anaknya dengan menikahkan anaknya jika ada laki-laki menghendaki. Menurut data Pengadilan Agama (PA) Blitar, kasus perkawinan anak naik signifikan sejak Juni 2020 dengan 62 permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pasangan di bawah umur (detik.com 2020). Sementara itu, sejak Januari sampai Agustus tahun 2020, sebanyak 408 permohonan dispensasi perkawinan telah didaftarkan. Jumlah ini naik hampir 100 persen dibandingkan angka kasus perkawinan anak tahun 2019 yakni sebanyak 245 permohonan.

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mencatat tingginya jumlah perkawinan anak hingga saat ini dengan setidaknya ada 148 kasus. Pada penelitian yang dilakukan terhadap 131 sekolah di NTB, Kabupaten Lombok Tengah memiliki angka tertinggi yakni 48 perkawinan anak. Menyusul kemudian adalah Lombok Timur (33), Lombok Barat (20), Bima (17), Sumbawa (11), Mataram (9), Kota Bima (2), Dompu (2), dan Sumbawa Barat (1) (Kompas.com 2020).

Fasilitator Sekolah Perempuan di Lombok Utara melaporkan telah terjadi 9 kasus perkawinan anak di beberapa desa yakni Sambik Elen, Mumbul Sari, Sukadana, Bayan, dan Akar-akar secara beruntun. Kasus-kasus tersebut adalah perkawinan anak perempuan usia sangat muda yang menikah dengan laki-laki tidak sebaya. Gambaran usia dari 9 kasus tersebut adalah kasus 1 (NN, umur 12 tahun dengan AG, 21 tahun); kasus 2 (RM, umur 13 tahun dengan ZA umur 20 tahun), kasus 3 (NV, umur 14 tahun dengan SP umur 20 tahun); kasus 4 (LS, umur 14 tahun dengan RU umur 18 tahun); kasus 5 (ML, umur 16 tahun dengan NR, umur 30 tahun); kasus 6 (LM, 17 tahun dengan ZA, 20 tahun); kasus 7 (KT, 17 tahun dengan JW, 18 tahun); kasus 8: (LMr, 17 tahun dengan YSr, 17 tahun) dan kasus 9 (Ev, 13 tahun dengan Mr, 17 tahun).⁵

Marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan

Kegiatan serupa dengan contoh marginalisasi dari Mansour Faqih bahwa petani identik dengan laki-laki adalah program padat karya. Konotasi program padat karya adalah pekerjaan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan diidentikkan dengan laki-laki. Indonesia mempunyai program padat karya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Dalam laporan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), April 2020 jumlah tenaga kerja yang mengakses adalah dominan laki-laki yaitu 93,78% dan perempuan 6,22% atau laki-laki 55,448 orang dan perempuan 6,22 orang (TNP2K 2020).

Akses laki-laki terhadap PKTD mendekati angka 100%. Dalam program ini tidak ditemukan kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, namun perempuan nyaris tidak dapat mengakses. Jika ditelusuri penyebab ketimpangan akses perempuan ini disebabkan karena ketersediaan jenis pekerjaan yang maskulin. Pekerjaan yang tersedia adalah jenis-jenis pekerjaan yang dikonstruksi untuk laki-laki misalnya pekerjaan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, listrik. Dalam masyarakat yang

membakukan pembagian kerja secara ketat berdasar jenis kelamin maka jenis-jenis pekerjaan tersebut tidak dapat diakses oleh perempuan.

Realitas ini menggambarkan dampak dari konstruksi gender telah menyebabkan perempuan terpinggirkan dari akses program PKTD yang dianggap sebagai program untuk laki-laki. Padahal peluang kerja yang langsung dapat menghasilkan uang tunai semacam ini dibutuhkan baik oleh laki-laki maupun perempuan, karena perempuan juga kehilangan pekerjaan di masa Covid-19. Maka analisis gender menjadi penting digunakan dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) agar dapat menjawab masalah setiap individu, baik laki-laki, perempuan, maupun mereka yang berasal dari kelompok marginal lainnya. Ketersediaan dan akses terhadap program harus mempertimbangkan aspek gender. Tindakan afirmasi dibutuhkan pada program-program tertentu agar perempuan dapat mengejar ketertinggalannya.

Subordinasi

Subordinasi terhadap salah satu jenis kelamin umumnya terjadi kepada kaum perempuan. Hal ini terjadi di dalam keluarga dan masyarakat. Akibatnya banyak kebijakan dibuat tanpa menganggap penting kaum perempuan.

Mengutip artikel *Feminisme dan Covid-19* oleh Gadis Arivia, kecenderungan analisis gender arus utama atau pembangunan, status sosial, kesehatan, kultural dan ekonomi, hanya menempelkan konsep gender sebagai isu perempuan, atau disebut sebagai "stempel gender". Cara menganalisis seperti ini tidak mengaitkan persoalan diskriminasi, rasisme, eksploitasi, kepemimpinan yang lemah, sistem ekonomi buruk, serta hukum yang bias gender.

Sebagai contoh pendekatan "stempel gender" adalah bantuan sembako. Sembako (sembilan bahan pokok) adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan bahan pangan atau kebutuhan konsumsi rumah tangga sehari-hari, seperti: beras, minyak goreng, gula, minyak, sabun, dan lainnya. Bantuan ini merupakan bantuan sesaat dan reaktif, tanpa didasari data yang terkait kerangka pemikiran feminis. Respons pemerintah yang tidak menggunakan data terpilah gender, hasilnya hanya sesaat, dan tidak tepat sasaran serta tidak menghasilkan perubahan yang bermakna. Itu sebabnya, setiap terjadi krisis maka Indonesia kembali menerapkan "*Business as usual*" seperti pembagian sembako tanpa mengaitkan adanya sistem penindasan yang perlu dibongkar.

Dua paragraf di atas merupakan contoh kebijakan netral gender yang disebabkan oleh subordinasi terhadap perempuan. Maka representasi perempuan dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi pandemi masih minim. Perempuan dikotakkan dalam peran-peran domestik negara. Perspektif gender seharusnya melintasi batas sektoral, dan menjadi arus utama dalam semua sektor penanganan pandemi Covid-19. Di tingkat Satgas Penanganan Covid-19, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mestinya dihadirkan di semua agenda Kementerian Lembaga dalam penanganan pandemi.

Stereotype (pelabelan negatif)

Pelabelan negatif terhadap jenis kelamin tertentu menyebabkan terjadinya diskriminasi serta berbagai bentuk ketidakadilan lainnya. Di masyarakat banyak sekali pelabelan negatif yang dilekatkan pada kaum perempuan yang berakibat membatasi, menyulitkan, memiskinkan dan merugikan kaum perempuan. Pelabelan negatif juga terjadi di masa pandemi, misalnya lelucon atau canda tentang pendidikan jarak jauh yang muncul di media sosial. Anak-anak yang diharuskan belajar di rumah pada umumnya ditemani oleh ibunya. Namun, meski dalam situasi darurat cap buruk pada perempuan sebagai makhluk yang emosional terus direproduksi. Perempuan menjadi sasaran kesalahan, misalnya dalam kalimat "*Kalau mau badan biru-biru, belajarlah dengan ibu*" salah satu guyonan yang terjadi dalam sebuah keluarga antara kakak adik yang sedang menggambarkan perlakuan ibunya sebagaimana digambarkan oleh Puti, seorang mitra Kapal Perempuan di Pambangkik Batang Tarandam - Padang, Sumatera Barat.

Masalah di atas sama persis dengan ulasan Profesor Saparinah Sadli dalam bukunya *Berbeda Tetapi Setara*, yang melukiskan stereotip sebagai "gambaran dalam kepala kita", terdiri dari sejumlah sifat dan harapan yang berlaku bagi suatu kelompok (Sadli 2010). Gambaran tersebut tidak akurat karena stereotip merupakan suatu generalisasi tentang sifat-sifat yang dianggap dimiliki oleh orang tertentu tanpa perlu didukung oleh fakta objektif, seperti stereotip bahwa perempuan cerewet, sementara laki-laki rasional.

Stereotip masa pandemi ini juga ditulis oleh Radius Setyawan dalam opini di Kumparan (2020) berjudul "Lelucon yang Tak Lucu tentang Perempuan Saat Pandemi" yang mengupas fakta-fakta stereotip pada perempuan yang dilakukan oleh masyarakat umum hingga pejabat publik. Di bulan awal penyebaran

Covid-19, sebuah pernyataan yang dianggap lelucon menyebar, yakni "Corona negatif istri positif". Mahfud MD, Menteri Koordinator yang membawahi hukum dan HAM yang mendapat kiriman *meme* dari menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. *Meme* berbahasa Inggris berjudul "*Corona is like your wife*", yang dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan "Corona itu seperti istrimu, ketika kamu mau mengawini, kamu berpikir kamu bisa menaklukkan dia. Tapi sesudah menjadi istrimu, kamu tidak bisa menaklukkan istrimu".

Di akhir artikelnya, Radius Setyawan menyebutkan penelitian dari *Western California University* yang menunjukkan bahwa mereka yang kerap terpapar humor seksis menjadi toleran terhadap perilaku memusuhi dan mendiskriminasi perempuan. Radius juga menyebutkan penelitian lain oleh Julie A. Woodzicka dan Thomas E. Ford (2010) yang menyatakan lelucon seksis justru melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan dan mendorong perilaku seksis di kalangan pria. Padahal, ketika perempuan menjadi target guyonan, mereka memperoleh efek emosional yang merugikan, seperti rasa jijik, marah, dan dipermalukan.

Kepemimpinan Perempuan dan Inisiatif Mitigasi Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Gender.

Bagian ini menuliskan pengalaman Institut KAPAL Perempuan saat merespons isu-isu gender di masa pandemi sepanjang Maret-September 2020. Inisiatif ini dilakukan di desa-desa terpencil di kepulauan, pegunungan, pesisir, masyarakat adat, dan masyarakat miskin kota tempat pengorganisasian dan pendidikan kritis perempuan akar rumput yang dikembangkan melalui wadah belajar Sekolah Perempuan Nusantara.⁶

Sekolah Perempuan memiliki anggota setiap desa dan di antara anggota ini terpilih perempuan-perempuan yang memiliki kapasitas kepemimpinan yang kemudian disebut kader. Mereka yang disebut kader adalah anggota Sekolah Perempuan yang sudah terbangun kesadaran kritisnya, mempunyai kepekaan dan komitmen melakukan perubahan, memiliki keberanian menghadapi risiko dalam melakukan aksi nyata untuk perubahan yang lebih adil gender dan setara.

Kader⁷ yang lahir dari Sekolah Perempuan Nusantara adalah motor penggerak di komunitas masing-masing. Mereka mendapatkan penguatan kepemimpinan perempuan di Sekolah Perempuan sehingga dapat berperan sebagai kelompok strategis di desa karena dapat memahami, peka, dan berkomitmen untuk merespons isu-isu gender selama pandemi.

Sepanjang pandemi, aspek yang dianggap paling penting untuk diselesaikan adalah penanganan masalah kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pangan. Isu gender dianggap bukan bagian dari masalah pandemi sehingga tidak masuk dalam prioritas penanganan pandemi. Pandangan ini dihadapi oleh KAPAL Perempuan pada sebagian besar lapisan masyarakat, organisasi sosial, donator, relawan, dan pengambil kebijakan. Oleh karena itu dibutuhkan usaha keras untuk mendesak isu-isu gender supaya diakui sebagai aspek penting dalam penanganan pandemi.

Beberapa inisiatif untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam mitigasi pandemi ini dikembangkan bersama Sekolah Perempuan Nusantara di Nusa Tenggara Barat tepatnya di kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Kupang-Nusa Tenggara Timur, Padang-Sumatera Barat, Pangkajene dan Kepulauan - Sulawesi Selatan, Gresik - Jawa Timur dan Bantaran Kali Ciliwung - DKI Jakarta. KAPAL Perempuan bersama organisasi mitra lokal mengembangkan inisiatif-inisiatif yang sesuai dengan konteks lokal.

Dimulai sejak bulan Maret 2020, KAPAL Perempuan bekerja sama dengan LPSPDM melakukan edukasi protokol kesehatan dan pendampingan kasus perkawinan anak di Lombok Utara dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Inisiatif mengadvokasi isu-isu gender dalam Gugus Tugas dilakukan bersama Pondok PERGERAKAN di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Advokasi pengembangan data gender dilakukan di Lombok Utara, Lombok Timur dan di Gresik-Jawa Timur dilakukan bersama Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K). Bersama Pambangkit Batang Tarandam, KAPAL Perempuan mengembangkan ketahanan pangan yang terintegrasi dengan isu kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, bersama YKPM-Sulawesi Selatan, KAPAL Perempuan juga mengembangkan inisiatif tutorial anak sekolah di pulau Pangkajene dan Kepulauan.

Inisiatif Edukasi Penerapan Protokol Kesehatan yang Terintegrasi dengan Isu Gender

Di Lombok Timur dan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, KAPAL Perempuan bersama LPSPDM, dengan koordinator Ririn Hayudiani, telah melakukan edukasi dan memberikan bantuan yang diberi nama Paket "Sopoq Angen" yang dalam bahasa Sasak berarti 'Satu Hati'. Paket tersebut berisi barang dengan pesan untuk menjaga kesehatan dan tanggap terhadap isu-isu gender dan kelompok rentan. Bantuan diberikan khusus untuk perempuan miskin, perempuan korban kekerasan,

perempuan korban perkawinan anak, disabilitas, dan lansia dengan jenis barang dan pesan sebagai berikut:

- Sabun, pesan yang disampaikan adalah supaya rajin cuci tangan pakai sabun dan selalu menjaga kebersihan.
- Telur, dimaksudkan agar selalu mengonsumsi makanan bergizi dan bagi keluarga yang beternak ayam kampung atau bebek supaya tidak menjual atau menyisahkan telurnya untuk konsumsi keluarga.
- Bawang merah, bantuan bumbu ini memberi pesan agar memasak sendiri sayur untuk pemenuhan gizi keluarga dan mengajarkan bahwa pekerjaan memasak dapat dilakukan bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan karena keduanya ada di rumah.
- Vitamin C, bantuan ini untuk mengingatkan kembali untuk memperbanyak makan buah terutama yang harganya terjangkau.
- Madu, bantuan ini diberikan sebagai tambahan daya tahan tubuh khusus untuk ibu hamil, menyusui, anak-anak, dan lansia. Ini sebagai edukasi bahwa harus ada perhatian khusus untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan, anak, dan lansia.
- Bibit dan *polybag*, menyampaikan pesan supaya di rumah saja, jangan keluar, jangan bergerombol. Laki-laki dan perempuan di rumah bekerja sama menggunakan pekarangan yang ada untuk berkebun dan melatih swasembada pangan.
- Buku tulis dan pena, menyampaikan pesan bahwa perempuan adalah sumber pengetahuan dan pengetahuan yang dimiliki hendaknya digunakan untuk saling membantu sesama. Caranya dengan menggunakan buku untuk mencatat masalah-masalah perempuan di sekitarnya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, perkawinan anak, serta memberi motivasi untuk mencatat usulannya supaya suara perempuan didengar dalam penanganan Covid-19.

Menurut Ririn Hayudiani, wakil direktur LPSPDM, edukasi melalui bantuan Sopoq Angen ini telah menginspirasi masyarakat dan pemerintah setempat tentang sebuah kesadaran bahwa pandemi tidak hanya berdampak pada kesehatan. Dampak sosial budaya terutama isu-isu gender harus diangkat agar mendapat perhatian Pemerintah. Dan ini terbukti misalnya isu

perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan dan data gender dijadikan agenda masyarakat dan pemerintah sebagai agenda penanganan pandemi di kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur.

Inisiatif Advokasi Perempuan Dalam Gugus Tugas, Pemantauan Jaring Pengaman Sosial dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Advokasi Gugus Tugas

Pembentukan Gugus Tugas atau Satuan Tugas (Satgas) di tingkat desa minim pelibatan perempuan. Di desa-desa yang tidak diintervensi terbukti pembentukan Satgas tidak melibatkan perempuan. Pengalaman ini ditemukan di desa wilayah kepulauan yang didampingi oleh Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Sulawesi Selatan. Jika ada yang melibatkan, tampaknya hanya untuk memenuhi kebutuhan formalitas dan biasanya melibatkan PKK. Oleh karena itu, Satgas dipilih sebagai arena advokasi strategis di desa agar perempuan dapat masuk ke dalam struktur sehingga dapat mengadvokasi isu-isu perempuan dan kelompok rentan menjadi agenda prioritas. Strategi ini berhasil dilakukan di desa-desa lokasi Sekolah Perempuan di Kabupaten Kupang, Lombok Timur, dan Lombok Utara.

Sekolah Perempuan di Kabupaten Kupang berhasil mendorong Desa untuk mengalokasikan 10% dana penanganan Covid-19 bagi pemenuhan kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan. Isu-isu gender yang berhasil didesakkan adalah pendataan ibu hamil untuk mendapatkan layanan pemeriksaan, deteksi dini kanker, dan pemeriksaan kesehatan untuk lansia yaitu gula darah, kolesterol, asam urat, mata, dan penimbangan. Sementara di Lombok Timur dan Lombok Utara, Sekolah Perempuan dapat mendorong masuknya isu spesifik perempuan kepada pemerintah desa dan pemerintah kabupaten untuk melakukan penanganan terhadap perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari penanganan pandemi.⁸

Pendataan

Data merupakan masalah utama dari tepat tidaknya Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan program penanganan pandemi lainnya untuk mengenai sasaran. Oleh karena itu, advokasi data menjadi penting untuk memastikan perempuan dan kelompok marginal masuk dalam kelompok penerima JPS yang basisnya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sekolah Perempuan

Nusantara di Gresik melakukan penyesuaian dengan situasi yang terbatas dalam berinteraksi. Mereka bergerak cepat di bulan Maret 2020 melakukan pendataan menggunakan *Google Forms*, dan dalam waktu dua bulan dapat mengumpulkan data dari 767 kepala keluarga yang sebelumnya tidak masuk dalam DTKS.

Data ini selanjutnya diadvokasikan ke pemerintah kabupaten sebagai data usulan tambahan dan berhasil diperjuangkan. Keluarga-keluarga ini pada bulan Mei sudah mendapatkan bantuan sosial paket sembako, bantuan langsung tunai dari pemerintah nasional, kabupaten dan dana desa. Selain mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, Sekolah Perempuan juga mendapat perhatian khusus dan bantuan dari Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Jawa Timur yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Dr. Pinky Saptandari.

Menurut Iva Hasanah, Direktur Organisasi Kelompok Perempuan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) di Surabaya, kemampuan mendata secara daring merupakan kemajuan tersendiri dan adaptasi cepat yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh para ibu rumah tangga di desa-desa yang jarang bersentuhan dengan teknologi terkini. Selain DTKS, kebiasaan berkomunikasi menggunakan media daring ini juga dapat mendukung usaha-usaha ekonomi perempuan, mencegah kekerasan terhadap perempuan, dan perkawinan anak.

Menurut Tulu'ul Fajriani, penanggung jawab penguatan kapasitas Sekolah Perempuan di Lombok, para kader melakukan advokasi pembaruan DTKS melalui proses verifikasi dan validasi. Mereka melakukan pendataan partisipatif⁹ di desa melalui pertemuan langsung dengan tetap mematuhi standar protokol kesehatan. Pendataan partisipatif ini dilakukan menggunakan kajian indikator lokal dan perspektif gender untuk memastikan setiap perempuan miskin, kepala keluarga, korban kekerasan, dan kelompok rentan dapat dimasukkan dalam program JPS. Data partisipatif yang diperoleh kemudian diadvokasi di tingkat desa. Meski menghadapi penolakan yang keras, namun akhirnya inisiatif ini dapat diterima dan dilanjutkan sampai tingkat kabupaten.

Penanganan kasus perkawinan anak

Saraiyah, Denda Singaden Sri Budi Utami¹⁰ dari Sekolah Perempuan Lombok Utara mengantisipasi terjadinya perkawinan anak dengan cara mencari informasi secara proaktif melalui berbagai media. Misalnya, Saraiyah menemukan kasus perkawinan

anak di grup percakapan *WhatsApp* anak-anak sekolah dengan menyisir informasi setiap pesan yang berbunyi “*samawa*” (istilah untuk perkawinan yang bahagia dan penuh cinta menurut agama Islam). Saraiyah mencurigai menyebarnya kata *samawa* ini sebagai pertanda akan terjadi sebuah perkawinan. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saraiyah mencoba mencegah perkawinan anak dengan melacak beberapa lokasi, yang kemudian ditemukan adanya rencana perkawinan anak. Saraiyah dan kawan-kawannya berhasil membatalkan 5 dari 9 kasus perkawinan anak. Anak-anak perempuan ini dipulangkan dari rumah laki-laki yang melarikannya. Anak-anak ini merasa menyesal dan malu, dan para kader juga berhasil mendorong mereka kembali melanjutkan sekolah.

Kasus berikutnya, calon pengantin adalah laki-laki usia 19 tahun berstatus duda yang akan menikahi anak perempuan usia 12 tahun 7 bulan lulusan tingkat Sekolah Dasar. Kasus ini adalah kasus ketiga dalam satu minggu yang terjadi di desa-desa di kaki Gunung Rinjani, Lombok Utara itu. Dengan usaha keras dan musyawarah hingga larut malam, pada Kamis, 28 Mei 2020 rencana perkawinan anak itu berhasil dibatalkan. Ini merupakan upaya yang berisiko karena dilakukan di tengah-tengah adat yang kuat sekaligus di masa darurat bencana pandemi Covid-19 dan hari raya Idul Fitri.

Kasus tadi digunakan untuk melakukan penyadaran bahwa batas minimal umur perkawinan yang diperbolehkan sekarang adalah 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi, kepala dusun dan masyarakat setempat tetap meminta calon pengantin ini harus dikawinkan karena jika tidak dikawinkan akan melanggar norma adat *merarik*, yaitu prosesi menculik perempuan dibawa ke rumah laki-laki sebagai sarat untuk melakukan pernikahan. Jika perempuan sudah diculik dan tidak dinikahkan maka dianggap pelanggaran adat. Mereka diharuskan menikah setelah lebaran adat yaitu 3 hari setelah Idul Fitri 1 Syawal, karena aturan yang berlaku di Dusun Barung Birak, tidak boleh menikah sebelum lebaran adat.

Dalam keterbatasan waktu, maka kader-kader ini melakukan koordinasi dengan Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara, untuk menjelaskan tentang terjadinya pemaksaan perkawinan antara anak perempuan dari Dusun Barung Birak, Desa Sambik Elen, dengan laki-laki dari Dusun Telaga Legundi, Desa Senaru; keduanya dari Kecamatan Bayan. Sekolah Perempuan menginisiasi pertemuan antara Kepala Dusun Barung Birak, Legundi, tokoh adat, tokoh agama, konselor Perlindungan

Anak untuk sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Pada akhirnya, kepala dusun dan tokoh setempat setuju untuk mengembalikan anak perempuan kepada keluarganya dan perkawinan dibatalkan. Dalam kesempatan ini juga, pihak desa akan membuat *awig-awig* atau aturan adat pelarangan perkawinan anak terutama di tingkat dusun karena lebih strategis untuk memperkuat Peraturan Desa (Perdes). Namun malam berikutnya Sri mendapat informasi baru bahwa empat hari lalu telah terjadi lagi perkawinan anak umur 15 tahun. Kejadian ini semakin memacu kita untuk mencari strategi yang kontekstual agar dapat memutus mata rantai perkawinan anak.

Terjadinya 9 (sembilan) kasus perkawinan anak secara beruntun di masa Covid-19 tersebut melatarbelakangi inisiatif KAPAL Perempuan, LPSPDM, dan Sekolah Perempuan untuk mengadakan kegiatan kesadaran hukum. Inisiatif ini didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang kemudian bersama-sama menyelenggarakan Pendidikan Hukum khusus untuk menangani kasus perkawinan anak. Pendidikan hukum ini berlangsung secara daring selama 4 hari pada akhir Agustus sampai awal September 2020, yang dikoordinasi oleh tim KAPAL Perempuan¹¹ melibatkan perempuan advokat serta aktivis yang selama ini memperjuangkan revisi UU Perkawinan yaitu Dian Kartikasari dan Endang Susilowati.

Inisiatif Pengembangan Usaha Pembibitan Tanaman dan Pencegahan KDRT di Kota Padang

Masa awal pandemi dirasakan sebagai masa kecemasan karena informasi tentang pandemi silih berganti, bahkan simpang siur. Di antara kekhawatiran tersebut, anggota Sekolah Perempuan dari kelurahan Batugadang, Baringin dan Tarantang yang disingkat *Barita* mulai mengidentifikasi masalah-masalah perempuan di sekitarnya. Pada bulan Maret ditemukan 1 (satu) kasus KDRT, kemudian beruntun terjadi di bulan April dan Mei, ditemukan 7 (tujuh) kasus KDRT. Karena penerapan PSBB, 7 (tujuh) kasus poligami juga baru diketahui oleh istri pertama. Selain kasus KDRT juga terjadi kasus perdagangan perempuan terhadap anak perempuan kelas 2 SMP yang dijual oleh temannya kepada laki-laki dewasa. Pelaku berdalih bahwa sejak pandemi ia tidak mendapatkan uang saku dari orang tuanya.

Kasus-kasus ini terjadi di wilayah Sekolah Perempuan yang dikelola oleh KAPAL Perempuan, yaitu di kelurahan Tarantang, Baringin, dan Batugadang, di Kota Padang. Berdasarkan data lapangan dari Yulianti, Direktur organisasi Pambangkit Batang Tarandam di Padang menemukan 7 kasus KDRT terhadap perempuan di Kelurahan Tarantang, Kelurahan Baringin dan Kelurahan Batugadang. Ketujuh kasus tersebut adalah : umur 26 dan baru menikah 6 bulan, umur 45 tahun, umur 28 tahun, umur 44 tahun, umur 33 tahun, umur 35 tahun, dan umur 26 tahun belum satu tahun menikah.

Saat kasus pertama ditemukan, penanganan hanya dilakukan melalui telepon karena saat itu tidak ada yang berani keluar rumah di masa pandemi. Inspirasi datang dari salah satu pengurus dan pemimpin Sekolah Perempuan di Tarantang, yakni Carmaleni (Ceca) yang berani beraktivitas sebagai satuan tugas (Satgas). Keberanian Ceca membuat teman-temannya berani melakukan pendampingan korban kasus KDRT secara langsung. Pendampingan yang dilakukan kepada korban dilakukan dengan cara melaporkan dan mempertemukan Ketua RT dan Lurah dengan pelaku (suami) dan korban. Kasus ini berhenti pada perjanjian bahwa suami tidak mengulangi lagi dan berada dalam pantauan aparat serta masyarakat.

Sementara di Batugadang, aparat kelurahan sudah sigap menangani langsung. Kesadaran ini tumbuh karena Sekolah Perempuan secara intensif melakukan sosialisasi pencegahan KDRT dalam pertemuan-pertemuan RT dan kelurahan. Dua di antara anggota Sekolah Perempuan juga menjadi RT dan sekretaris RW. Sementara anggota lainnya merelakan rumahnya sebagai rumah transit penanganan KDRT.

Di Batugadang, Sekolah Perempuan mengembangkan pondok bibit tanaman sayur mayur, ubi, kacang tanah dan tanaman obat sebagai salah satu usaha produktif perempuan di masa pandemi dan penanganan KDRT. Pondok bibit ini menjadi tempat berkumpul perempuan dan berbagi informasi tentang isu-isu perempuan. Sebanyak 5% dari hasil usaha pondok bibit dialokasikan untuk dana tak terduga, misalnya untuk pendampingan kasus. Saat ini, kegiatan ekonomi yang terintegrasi dengan isu gender tersebut sudah berkembang di Kelurahan Baringin dan Tarantang.

Inisiatif Tutorial untuk Anak Sekolah di Pulau Sabutung, Kabupaten Pangkep

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring berdampak besar terutama di perdesaan atau kelurahan

di wilayah terpencil dengan akses internet terbatas dan keluarga yang tidak memiliki telepon seluler (ponsel). Anak-anak mengalami kesulitan karena para orang tua tidak mempunyai ponsel dan kurang menguasai teknologi. Mereka khawatir anaknya tidak naik kelas karena tidak bisa mengikuti PJJ daring. Bagi yang sudah memiliki ponsel, PJJ juga memunculkan keluhan baru terutama bagi yang pendapatannya menurun yakni keharusan menyediakan dana untuk membeli pulsa¹².

Bermula dari ide membantu tutorial untuk anak-anak sekolah, para remaja Sekolah Perempuan di Pulau Sabutung, Kabupaten Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan) berinisiatif untuk mengintegrasikannya dengan isu-isu gender. Tutorial yang semula merupakan respons terhadap kesulitan belajar kemudian dimanfaatkan sebagai media untuk mencegah terjadinya KDRT karena pada umumnya para suami menekan istri untuk menemani anaknya belajar. Dan buntutnya adalah kemarahan suami karena para istri yang tidak tamat SD atau bahkan ada yang tidak mengenyam pendidikan sekolah itu tidak mampu membantu anaknya belajar. Selain untuk membantu PJJ dan advokasi KDRT, kegiatan tutorial juga diisi dengan kampanye pencegahan perkawinan anak. Saat ini tutorial dan penyadaran isu gender diperluas daya jangkauannya melalui layanan Radio Komunitas Perempuan Pulau.

Penutup

Pembelajaran yang dapat diambil dari inisiatif-inisiatif tersebut di atas adalah pentingnya upaya mitigasi kebencanaan berbasis perspektif gender untuk memastikan kaum perempuan (terutama kelompok marginal) tidak ditinggalkan dalam setiap proses, mulai dari masa darurat, pemulihan, hingga rekonstruksi. Pelibatan perempuan dan penggunaan kerangka analisis gender harus dimulai sejak tahapan perencanaan hingga evaluasi. Penanganan pandemi secara nasional sebagai sebuah bentuk mitigasi kebencanaan non-alam masih jauh dari pendekatan berkeadilan gender mulai dari kelembagaan, tata kelola, dan operasionalisasinya.

Sementara itu, pada level komunitas, praktik mitigasi bencana yang berbasis kebutuhan perempuan dan berperspektif keadilan gender terjadi di banyak wilayah dan dikembangkan oleh berbagai organisasi perempuan dan organisasi independen lainnya.

Berbasis pada sikap politik feminis bahwa pengalaman perempuan adalah pengetahuan, beberapa catatan pengalaman lapangan di atas adalah praktik dari pengembangan kesadaran kritis dan kepemimpinan

perempuan sehingga mampu merespons kebutuhan perempuan di masa pandemi. Inisiatif tersebut dapat terjadi jika di wilayah tersebut terdapat komunitas perempuan terorganisir dan memiliki kader-kader dengan kualitas kepemimpinan yang memadai.

Pengalaman-pengalaman yang dicatat dalam artikel ini juga memperlihatkan bahwa praktik baik (*best practices*) dengan pendekatan keadilan gender sebagai mitigasi pandemi mampu menjangkau kelompok-kelompok marginal yang selama ini terjauhkan dari akses. Inisiatif perempuan ini juga mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi eskalasi kasus kekerasan berbasis gender di masa bencana, menggerakkan komunitas untuk melakukan pemantauan pelaksanaan skema perlindungan sosial, dan menggerakkan solidaritas warga untuk bahu-membahu membantu sesama di masa pandemi Covid-19.

Daftar Pustaka

- Arivia, G 2020, "Feminisme dan Covid-19", *Wacana Feminis* 11 Mei 2020, diakses 17 Oktober 2020, <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/feminisme-dan-covid-19>.
- Detik.com 2020, diakses 17 Oktober 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5179353/pandemi-covid-19-buat-anak-dibltar-terseret-pergaulan-bebas-dan-nikah-dini>.
- Equal Measure 2019, *Harnessing The Power of Data For Gender Equality, Introducing the 2019 SDG Gender Index*, EM2030, London, diakses 17 Oktober 2020, https://www.equalmeasures2030.org/wp-content/uploads/2019/07/EM2030_2019_Global_Report_English_WEB.pdf.
- Faqih, M 1996, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Komnas Perempuan 2020a, *Kajian Dinamika Perubahan Di Dalam Rumah Tangga Selama Covid-19 Di 34 Provinsi Di Indonesia*, diakses pada tanggal 17 Oktober 2020, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-eksekutif-summary-kajian-dinamika-perubahan-di-dalam-rumah-tangga-edisi-revisi>.
- Komnas Perempuan 2020b, *Melayani dengan Berani: Gerak Juang Pengada Layanan dan Perempuan Pembela HAM di Masa COVID-19*, diakses 17 Oktober 2020 <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-siaran-pers-kajian-situasi-layanan-bagi-perempuan-korban-kekerasan-dan-perempuan-pembela-ham-di-masa-pandemi-covid-19-14-agustus-2020>.
- Kompas.com 2020, "Perkawinan Anak hingga Kawin Tangkap, Janji Terucap karena Tuntutan Adat", diakses 16 Oktober 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/09/20/06070051/perkawinan-anak-hingga-kawin-tangkap-janji-terucap-karena-tuntutan-adat?page=all>.
- KPPPA 2020a, *Layanan Psikologi Sehat Jiwa*, diakses 17 Oktober 2020, <https://berjarak.kemenpppa.go.id/videos/peluncuran-layanan-psikologi-untuk-sehat-jiwa-sejiwa/>.
- KPPPA 2020b, diakses 17 Oktober 2020, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2674/berkontribusi-penuhi-kebutuhan-spesifik-perempuan-dan-anak-kemen-pppa-apresiasi-dunia-usaha-dan-para-donatur>.
- Kumparan.com 2020, "Lelucon yang Tak Lucu tentang Perempuan Saat Pandemi", diakses 16 Oktober 2020, <https://kumparan.com/radius-setiyawan/lelucon-yang-tak-lucu-tentang-perempuan-saat-pandemi-1tVWxiSkSu8/full>.
- Sadli, S 2010, *Berbeda Tapi Setara*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 2020, *Ringkasan Kebijakan Pengutamaan Penggunaan Dana Desa: Padat Karya Tunai Pencegahan Covid-19*, TNP2K, Jakarta, diakses 16 Oktober 2020, <http://tnp2k.go.id/download/23818PB%20PengutamaanPKTDFINAL.pdf>
- UN Women Indonesia 2020, *Menilai Dampak COVID-19 Terhadap Gender dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, 23 Oktober 2020, diakses 24 Oktober 2020, https://data.unwomen.org/sites/default/files/inline-files/Report_Counting%20the%20Costs%20of%20COVID-19_Bahasa.pdf.
- UNICEF Indonesia 2019, *Saying No to Child Marriage in Indonesia*, Oktober 2019, diakses 17 Oktober 2020, <https://www.unicef.org/indonesia/stories/saying-no-child-marriage-indonesia>.
- United Nations 2020a, *Accelerating The Realization of Gender Equality and the Empowerment of All Women and Girls*, United Nation, New York, 2020, diakses 17 Oktober 2020, <https://www.un.org/pga/74/event/high-level-meeting-on-the-twenty-fifth-anniversary-of-the-fourth-world-conference-on-women/>.
- United Nations 2020b, *The Sustainable Development Report 2020*, Cambridge University Press, June 2020, diakses 10 Oktober 2020, <https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/>.
- United Nations Population Fund 2020, *Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage, April 2020*, diakses 10 Oktober 2020, https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf.
- WHO 2020, diakses 17 Oktober 2020, <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.

Catatan Akhir

- 1 Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan adalah organisasi perempuan yang didirikan pada 8 Maret 2000 sebagai tanggapan terhadap perubahan-perubahan politik dan ekonomi yang terjadi pada masa reformasi. KAPAL Perempuan menjadi wadah bagi para aktivisnya untuk mengembangkan cara berpikir kritis khususnya di kalangan perempuan yang merupakan mayoritas tetapi masih tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan.
- 2 Organisasi mitra KAPAL Perempuan adalah LPSDM-NTB, Pondok PERGERAKAN NTT, KPS2K Jawa Timur, YKPM Sulawesi Selatan dan PBT Padang. Kerjasama dilakukan secara intensif selama 7 tahun untuk mengembangkan *GENDER WATCH*, sebuah gerakan pemantauan bersama dalam melakukan pemantauan

- dengan perspektif gender dan inklusif. Tujuannya memastikan perlindungan sosial dipenuhi dan disediakan oleh pemerintah, dapat diakses, berkualitas dan dapat dinikmati oleh kelompok miskin, terpinggirkan, lansia, masyarakat adat, agama minoritas khususnya kelompok perempuan.
- 3 Sekolah Perempuan Nusantara adalah gabungan dari Sekolah Perempuan di 85 desa yang dikembangkan melalui program *Maju Perempuan Indonesia* (MAMPU) sebuah inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan periode 2012-2020. Sekolah Perempuan menjadi wadah belajar untuk pengembangan kepemimpinan perempuan akar rumput melalui proses membangun kesadaran kritis, kepekaan, dan komitmen untuk melakukan perubahan di komunitasnya agar lebih setara, berkeadilan gender, dan inklusif.
 - 4 Catatan lapangan Khusnul Khotimah (KAPAL Perempuan) dalam pendampingan pemantauan terhadap penanganan Covid-19 di Sekolah Perempuan Nusantara di Jakarta.
 - 5 Data kasus yang ditangani oleh Sekolah Perempuan di desa Bayan dan Sukadana yang diinformasikan oleh fasilitator lapangan Sri Budi Utami dan Saraiyah, ketua Sekolah Perempuan di Lombok Utara.
 - 6 Profil Sekolah Perempuan bisa dilihat di [\(https://kapalperempuan.org/profil-sekolah-perempuan/#:~:text=Sekolah%20Perempuan%20adalah%20wadah%20pembelajaran,gender%2C%20usia%20dan%20kemampuan%20fisik\)](https://kapalperempuan.org/profil-sekolah-perempuan/#:~:text=Sekolah%20Perempuan%20adalah%20wadah%20pembelajaran,gender%2C%20usia%20dan%20kemampuan%20fisik). (diakses 17 Oktober 2020)
 - 7 Kader adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anggota Sekolah Perempuan Nusantara yang telah menguat kepemimpinannya, terbangun kesadaran kritisnya, memiliki kapasitas dalam mengorganisir perempuan dan advokasi isu-isu perempuan di desanya.
 - 8 Catatan Delmyser Maka Ndolu sebagai penanggung jawab pengembangan Sekolah Perempuan Nusantara di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
 - 9 Pendataan partisipatif ini sudah dipelajari dan dipraktikkan dalam advokasi data korban gempa di Lombok Utara untuk mendapatkan program bantuan pemerintah. Kader-kader ini dilatih oleh Tim LPSDM dan KAPAL Perempuan, didampingi oleh fasilitator lapangan yaitu Sri Budi, Rohana, Rosita, Hadijah dan Elly Setyani.
 - 10 Saraiyah dan Denda Singaden adalah ketua Sekolah Perempuan di Lombok Utara dan Sri Budi Utami adalah warga desa setempat yang menjadi fasilitator lapangan. Di Desa Sambik Elen, Sri bertanggungjawab melakukan pengorganisasian dan pendidikan kritis perempuan di desanya melalui Sekolah Perempuan.
 - 11 Tim Pendidikan Hukum dari KAPAL Perempuan adalah Justin Anthony Gelatik, Ulfa Kasim, Eci Ernawaty, Budhis Utami, Misiyah dan tim LPSDM adalah Ririn Hayudiani dan Tulu'ul Fajriani.
 - 12 Catatan lapangan Tim yang mengembangkan Sekolah Perempuan Nusantara dari organisasi YKPM-Sulawesi Selatan yaitu Rosniati dan Nurhayati. Selain itu, penuturan ini juga disampaikan oleh Fitri, salah satu remaja yang tinggal di pulau Sabutung dan menjadi leader di Sekolah Perempuan Muda.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California)
2. Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
3. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)
4. Elizabet Repelita Kuswijayanti, M.Si (Indonesia)
5. Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)
6. Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
7. Mariana Amiruddin

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Tanah Manisan No. 72
RT 07/ RW 03 Kel. Cipinang
Cempedak, Kec. Jatinegara
Jakarta Timur - INDONESIA
Telp: (+62) 812 1098 3075

Canada

{ KURAWAL }
FOUNDATION
include | protect | engage

